

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Aminuddin Ilmar. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, Cet-1, 2013.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan hukum tentang kebatalan perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010
- Gustav Radbruch. *Tujuan Hukum*. diterjemahkan oleh Shidarta. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Jimmly Asshidiqie. *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Johannes Ibrahim Kosasi. *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*. Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Nomensen Sinamo. *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2010.

_____. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.

Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto. *Perihal Kaidah Hukum*. Alumni, Bandung, 1982.

R.B. Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Salim, H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet-5, 2010.

Samadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Jakarta, UI Press, 1976.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet-21 , PT. Intermasa, Jakarta, 2005.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2003.

2. Jurnal dan Sumber Lainnya

<https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id>.

<https://buruh-online.com/2014>.

<http://ejurnal.ung.ac.id>

<https://idtesis.com>.

<https://jurnal.uisu.ac.id>.

<https://hukamnas.com>.

<https://kbbi.web.id/.2021>.

<http://kostummerdeka.blogspot.com/2014>.

<https://legalstudies71.blogspot.com/2015>.

<https://media-n.id>.

<https://psbhfhunila.org/2020>.

<https://smartlegal.id>.

<https://www.dslalawfirm.com>.

<https://www.hukumonline.com>.

<https://www.jurnalhukum.com>.

<https://www.merdeka.com>.

<http://www.thefreedictionary.com>.

<http://zakisyahputra.blogspot.com/2011>.

Joko Prabowo. “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Nominee Atas Kepemilikan Saham Pada Perseroan Terbatas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1269/Pid.B/2013/PN Mdn. Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3007 K/Pdt/2014)”, Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.

Lucky Suryo Wicaksono, “Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Nominee”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 23, Yogyakarta, 2016.

Rilda Murniati, “Asas Tanggung Renteng Pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum Dan Akibat Hukum Bagi Harta Perkawinan”, Jurnal Cepalo Volume 2, Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung, 2018.

Saefic Redzky Al-Farisi, Abdul Salam, Rouli Anita Valentina, “Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee*) Dalam Penanaman Modal di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1929K/Pdt/2013)”, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2016.

3) Peraturan PerUndang-Undangan

a) Undang-Undang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, *Tentang Jabatan Notaris*.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, *Tentang Wajib Daftar Perusahaan*.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1011, *Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata*.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 35K/Pdt/2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 879K/Sip/1974.

Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor: 14/PDT/2017/PT DPS.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 985/14/Pdt/2017/PT.Dps.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 451/Pdt/PN.JKT.BAR.